



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Telp. (0561) 8102130
e-mail: dpppa@kalbarprov.go.id website: dp3a.kalbarprov.go.id
Pontianak

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 015 /DPPPA.A 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi yang memerlukan keterbukaan informasi dari badan publik;
 - b. dalam upaya pemberian pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan murah, diperlukan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang tersusun dalam suatu Daftar Informasi Publik (DIP);
 - c. bahwa dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 630/DPPPA.A 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 1 l. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa

kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

9. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124);
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DPPPA.A/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 3. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 996/DPPPA.A 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

- KETIGA : Untuk penetapan informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas maka akan dilakukan uji konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik Pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat tersedia dan diumumkan pada website Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,



Yuline Marhaeni
YULINE MARHAENI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 015 /DPPPA.A/2023

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A, INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA :

NO.	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN TAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
1.	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file_pdf)	Selama berlaku
2.	Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file_pdf)	Selama berlaku
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file_pdf)	Selama berlaku
4.	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlidungsn Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file_pdf)	Selama berlaku
5.	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file_pdfj)	Selama berlaku

6.	Profil PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file_pdl)	Selama berlaku
7.	Visi, Misi, Moto dan Maklumat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file_pdf)	Selama berlaku
8.	Daftar Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
9.	Analisis Jabatan (ANJAB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
10.	Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selatna berluku
11.	Produk Layanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
12.	LHKPN Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file-Pdf)	1 Tahun
13.	LHKASN, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file-Pdf)	1 Tahun

14.	Agenda Kegiatan Substansi Umum Dan Aparatur Tahun 2023	Sekretaris	Kasubag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file Pdf)	1 Tahun
15.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file Pdf)	1 Tahun
16.	RKA DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file Pdf)	1 Tahun
17.	RKAK Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file Pdf)	1 Tahun
18.	DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file Pdf)	1 Tahun
19.	(LAKIP) Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file Pdf)	1 Tahun
20.	Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2023	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file Pdf)	1 Tahun
21.	Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file Pdf)	Selama berlaku

22.	LPPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file-Pdf)	1 Tahun
23.	LKPJ Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/ Soft (file-Pdf)	I Tahun
24.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file-Pdf)	1 Tahun
25.	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/SOft (file-Pdf)	I Tahun
26.	Kegiatan Sub. Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris	Bagian Keuangan dan Aset	Hard/ Soft (file-Pdf)	I Tahun
27.	Informasi laporan pengadaan barang dan jasa	Sekretaris	Bagian Keuangan dan Aset	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
28.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev Pejabat yang ditunjuk sesuai Tupoksi	Hard/ Soft (file-Pdf)	1 Tahun
29.	Laporan Kunjungan Pihak Eksternal	Sekretaris	Umum dan Aparatur, dan Petugas PPID yang tertuang Dalam SK	Hard/Soft (file-Pdf)	I Tahun
30.	Rekapitulasi Program Kegiatan Bidang T.A 2023	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/Soft (file-Pdf)	I Tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO.	NAMA INFORMASI	PWABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
Untuk saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.					

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBIT INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur, dan Petugas PPID yang tertuang Dalam SK	Hard/ Soft (file-Pdf)	1 Tahun
2.	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur, dan Petugas PPID yang tertuang Dalam SK	Hard/ Soft (file-Pdf)	1 Tahun
3.	Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur, dan Petugas PPID yang tertuang Dalam SK	Hard/ Soft (file-Pdf)	1 Tahun
4.	Dokumen dan Informasi Inventarisasi Barang	Sekretaris	Bagian Keuangan dan Aset	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
5.	SOP Bagian Urnum dan Aparatur	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
6.	SOP Bagian Renja dan Monev	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
7.	SOP Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	Bagian Keuangan dan Aset	Hard/Soft (file-Pdf)	Selama berlaku

8.	SOP Bidang Kualitas Hidup Perempuan	Kabid KHP	Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kabid yang sesuai Tupoksi	Hard/Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
9.	SOP Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Kabid PPHA	Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kabid yang sesuai Tupoksi	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
10.	SOP Bidang Perlindungan Perempuan	Kabid PPA	Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kabid yang sesuai Tupoksi	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
11.	SOP Bidang Data Gender Dan Anak	DGA	Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kabid yang sesuai Tupoksi	Hard/ Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
12.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sekretaris	Bagian Renja dan Monev Pejabat yang ditunjuk sesuai Tupoksi	Hard/ Soft (file-Pdf)	1 Tahun
13.	Standar Pelayanan Pembuatan Tanda Pengenal / Nametag	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur	Hard/Soft (file-Pdf)	Selama berlaku
14.	Laporan Akhir dan Master Plan PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat 2023	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Aparatur, dan Petugas PPID yang tertuang Dalam SK	Hard/Soft (file-Pdf)	1 Tahun

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



[Handwritten Signature]
YULIENE MARHAENI